

# **SINERGI PENGELOLAAN DESA MEMBANGUN DENGAN KEGIATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Kasus PT. Indonesia Power, Gunung Salak)**

## ***The Synergy of Village Developing Management through Corporate Social Responsibility Activities***

Lala M. Kolopaking<sup>\*)</sup>, Marzuqo Septianto, Ervan Ambarita

Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) - Institut Pertanian Bogor

<sup>\*)</sup>E-mail : lalakolopaking@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Improvement the standard of living for villagers is increasingly open with the existence of UU No. 6 tahun 2014 concerning villages government. Various multistakeholders can strengthen village-based development mechanisms in synergy. The aim of this study is to analyze the synergy of the Corporate Social Responsibility management system with the management of a developing village by Indonesia Power PLTP Kamojang Branch Gunung Salak Ltd. This research is a policy research with a sequential mixed model design. Data were collected in the form of qualitative and quantitative data with methods of observation, interviews, and focused discussions. The results of the study show that Indonesia Power PLTP Kamojang Branch Gunung Salak Ltd and multistakeholders have succeeded in forming relations between different actors to improve village development. As for interacting with groups of people who are vulnerable to problems with their livelihood systems, corporate social responsibility mechanisms are improved based on the aspirations of the people who collaborate with multistakeholders from the planning stage to evaluating at the village to district level. Through this management mechanism assistance to the community can be done inclusive so that assistance can be recorded and measurable benefits.*

*Keywords: community development, corporate social responsibility (CSR), stakeholders collaboration*

### **ABSTRAK**

Peningkatan taraf hidup warga desa semakin terbuka dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbagai pihak dapat menguatkan mekanisme pembangunan berbasis desa secara sinergi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sinergitas sistem pengelolaan *Corporate social responsibility* dengan pengelolaan desa membangun oleh PT Indonesia Power PLTP Kamojang Unit Gunung Salak. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan desain *a sequential mixed model*. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan kuantitatif dengan metode observasi, wawancara terstruktur, dan diskusi terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indonesia Power PLTP Kamojang Unit Gunung Salak bersama multipihak telah berhasil dalam membentuk relasi antar aktor yang berbeda-beda untuk meningkatkan desa membangun. Adapun dalam berinteraksi dengan kelompok masyarakat yang rentan mengalami masalah sistem penghidupannya, dilakukan perbaikan mekanisme *corporate social responsibility* berdasarkan aspirasi masyarakat yang bekerjasama dengan multipihak dari tahap perencanaan hingga evaluasi di tingkat desa hingga kabupaten. Melalui mekanisme pengelolaan ini pendampingan kepada masyarakat dapat dilakukan secara inklusif sehingga bantuan dapat terekam dan terukur manfaatnya.

Kata kunci: kolaborasi multipihak, pengembangan masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

### **PENDAHULUAN**

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi mandat kepada desa untuk mampu mengelola pembangunan yang ada di desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa dituntut untuk merencanakan, melakukan pembangunan dan mengevaluasi program pembangunan desanya sebagai upaya peningkatan kualitas hidup serta kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Meskipun desa mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat, namun bantuan tersebut belum mencukupi untuk pembangunan di desa sehingga perlu didukung oleh berbagai pihak termasuk swasta.

PT Indonesia Power UPJP Kamojang PLTP Gunung Salak (PTIPGS) telah melaksanakan kegiatan operasi-produksi di lapangan gas bumi kawasan Gunung Salak sejak Tahun 1994. Sejak awal beroperasinya, PTIPGS telah melakukan berbagai

aktifitas yang dimaksudkan untuk menunjukkan itikad PTIPGS sebagai sebuah perusahaan dan salah satu pihak yang berperan aktif dalam perkembangan dan pengembangan Kawasan Gunung Salak, khususnya desa-desa yang berada di sekeliling wilayah operasi PTIPGS. Berbagai aktifitas tersebut, termasuk pemberian bantuan kepada masyarakat dan pemerintah setempat, pelatihan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, serta bentuk aktifitas lainnya, belakangan lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kegiatan-kegiatan CSR PTIPGS mencakup program dan target wilayah yang lebih luas dengan sasaran-sasaran yang lebih terukur, yakni masyarakat di 10 (sepuluh) desa sekitar wilayah operasi PTIPGS. Kesepuluh desa tersebut adalah Desa Purwabakti, Cibunian dan Ciasmara di Kecamatan

Pamijahan, Kabupaten Bogor; Desa Kabandungan, Cipeuteuy dan Cihamerang di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi; Desa Pulosari, Palasari Girang dan Kalapanunggal di Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi; dan Desa Sundawenang di Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi.

Upaya pemberdayaan masyarakat ini merupakan bentuk komitmen perusahaan sebagai wujud menjaga pembangunan berkelanjutan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan bisnis perusahaan. Untuk itu, proses pembangunan melibatkan berbagai kalangan, seperti pemerintah, politisi, akademisi dan masyarakat. Sejalan dengan sudut pandang Pemerintah Daerah dan Desa yang melihat, bahwa kegiatan CSR sebagai bagian dari partisipasi perusahaan dalam pembangunan daerah dan Desa. Adapun secara politik, CSR dilihat sebagai sarana perusahaan untuk memperoleh dukungan dari pemerintah, sedangkan bagi masyarakat CSR merupakan hak warga sekitar untuk memperoleh manfaat dari kehadiran perusahaan terhadap peningkatan taraf hidup mereka.

PTIPGS memandang, bahwa kegiatan CSR tidak hanya berperan sebagai instrumen dalam membangun iklim usaha yang baik, tetapi juga sebagai media untuk memperoleh dukungan dari *stakeholders* di sekitar wilayah operasi. Selain itu, kegiatan CSR dijadikan upaya perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan di dalam kehidupan masyarakat yang dapat mengganggu jalannya operasi perusahaan. Sebagaimana diketahui produksi gas alam PTIPGS mensyaratkan juga kelestarian hutan di kawasan lapangan gas bumi. Dengan demikian, aktifitas sosial ekonomi masyarakat dari desa-desa di sekitar kawasan hutan menjadi penting sebagai penentu kelestarian kawasan hutan. Untuk itu, kegiatan CSR PTIPGS tidak terpisah dari upaya keikutsertaan perusahaan mengelola aktifitas sosial ekonomi masyarakat agar sejalan dengan upaya pelestarian kawasan hutan Gunung Salak.

Mengingat bahwa kegiatan pengoperasian pembangkit PTIPGS akan berjalan dalam waktu yang lama, maka PTIPGS harus memberikan manfaat terhadap lingkungan di sekitar pembangkit. Upaya PTIPGS dalam mencapai tujuan ini, dilakukan dengan berpartisipasi aktif dalam membantu pemerintah dengan membentuk tatanan masyarakat yang kuat dibidang sumberdaya lahan dan hutan, ekonomi, teknologi digital, dan kualitas penduduk serta sosial budaya masyarakat. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tatanan tersebut pun akan dijalankan secara terprogram melalui sinergitas jalinan multi-pihak yang saling memberdayakan, sehingga menguatkan modal sosial dari masyarakat secara utuh.

Hal ini menunjukkan bahwa kelima pilar program CSR PTIPGS saling terkait satu sama lain. Kegiatan bidang sumberdaya lahan dan hutan akan mendukung kelestarian alam. Selain itu akan menjaga kualitas dan kuantitas air untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat juga untuk operasional PTIPGS. Pengembangan program ekonomi diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan juga harus mendukung kelestarian lingkungan. Peningkatan pendapatan akan membuat masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, peningkatan pendapatan juga akan berdampak positif terhadap kepedulian

masyarakat terhadap lingkungan dan pelestarian budaya. Pengembangan ekonomi masyarakat juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Salah satunya adalah teknologi digital. Program-program PTIPGS tersebut melibatkan berbagai aktor seperti masyarakat binaan (komunitas di 10 Desa sekitar wilayah operasi PTIPGS), NGO, perusahaan swasta, dan usahawan lokal, pemerintah daerah, dan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sinergitas antar aktor dalam pengelolaan desa membangun dengan mekanisme *corporate social responsibility* berbasis masyarakat yang dilakukan oleh PTIPGS mulai pada perencanaan dan pelibatan berbagai aktor pembangunan secara partisipatif di 10 Desa sekitar wilayah operasi PTIPGS.

Penelitian ini pada dasarnya hendak melihat bagaimana sinergi pengelolaan desa membangun dengan *corporate social responsibility* oleh PT Indonesia Power Gunung Salak (PTIPGS) yang bekerjasama dengan multi pihak. Hal ini dilihat dengan menggunakan konsep CSR dalam Pemberdayaan Masyarakat (Dunham, Grube, and Castañeda 1994) dan konsep "*from community engagement to community emergence*" oleh Olson dan Brennan (Kenny, McGrath, and Phillips 2018).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi mengenai pola pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), antara lain : Selama 50 tahun bisnis internasional (IB) menitikberatkan pada pengelolaan lingkungan (hijau); etika, hak dan tanggung jawab; kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan (Kolk 2016). Hal ini menjadikan bisnis internasional (IB) berkembang secara global di negara berkembang dan negara maju dalam 'arus utama' IB (Pisani et al. 2017).

Pengaruh kinerja lingkungan dari perusahaan yang ikut serta dalam PROPER dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki signifikansi pada ROA dan ROE untuk peringkat emas (Angelia and Suryaningsih 2015). Hal ini juga berkaitan dengan pembangunan dan manajemen reputasi perusahaan yang dianalisis dari perspektif berbagai kelompok pemangku kepentingan (Šontaitė-Petkevičienė 2015). Sebagaimana di Mexico, perusahaan di masing-masing wilayah negara Mexico berfungsi untuk merangsang pembangunan lokal di daerah produksi minyak (García-Chiang 2018). Berbagai program yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, seperti halnya di daerah tambang Batulicin, Kalimantan Selatan (Nirmaya, Muflikhati, and Simanjuntak 2014).

Penggunaan media sosial pada kegiatan CSR menjadi penting. Strategi ini telah dilakukan oleh PT Merck Indonesia, dengan tujuan untuk menumbuhkan interaksi horizontal antara perusahaan dan pemangku kepentingan yang mengarah pada konsep pemasaran sosial perusahaan (Rahmaningsih 2013). Dimana tergolong masih relatif baru dalam literatur bidang komunikasi CSR yang cukup berkembang melalui situs web yang dengan cepat menjadi media komunikasi perusahaan untuk perusahaan seperti di Ghana dan sekitarnya (Abukari and Abdul-Hamid 2018).

Program dan manajemen laba tidak memiliki hubungan yang signifikan, dimana perusahaan-perusahaan dalam kategori memiliki dampak lingkungan yang tinggi tampaknya tidak mempraktekkan manajemen laba namun menampilkan

tingkat kinerja *Corporate Social Responsibility* yang lebih tinggi (Moratis and van Egmond 2018). Adapun praktik CSR dapat memberikan pengaruh langsung pada kepuasan pelanggan dan pengaruh tidak langsung yang memediasi loyalitas pelanggan (Torrico, Frank, and Arandia Tavera 2018), serta dapat memainkan peran dalam menentukan preferensi masyarakat terkait penyediaan lapangan kerja (Simpson and Aprim 2018). Oleh karena itu, orientasi keberlanjutan CSR dalam memengaruhi model bisnis terletak pada budaya dan identitas perusahaan yang dicirikan sejak didirikan melalui keterlibatan sosial-ekonomi yang mendalam di masyarakat (Del Baldo 2018). Dimana penekanannya terletak pada respons terhadap peraturan; memberi pemahaman aspek kognitif dengan benar; dan merepresentasikan nilai-nilai budaya, seperti yang terjadi di Pakistan dan Selandia Baru (Khan, Lockhart, and Bathurst 2018). Selain itu, program CSR juga memiliki ikatan dengan faktor kontekstual termasuk tradisi, pemerintahan politik dan modernitas yang khas (Nguyen, Bensemman, and Kelly 2018).

Adapun dalam penelitian ini, memiliki kebaruan dibanding dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, dimana pengelolaan desa membangun bersinergi dengan mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui beragam kegiatan yang menekankan pada aspek kerjasama multipihak. Inisiasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Indonesia Power Gunung Salak membangun jalinan dengan pemerintah desa dengan memberi ruang agar aspirasi dapat diimplementasikan dalam program desa.

### **CSR dan Keberlangsungan Bisnis Perusahaan**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara lebih luas. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) merumuskan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, pertama, CSR merupakan komitmen dari bisnis. Kedua, CSR berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas, pemerintah dan keseluruhan merupakan dimensi-dimensi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan CSR (Rabin Ibnu Zainal 2006). Adapun konsepsi saat ini tentang kepentingan relatif dari tanggung jawab ekonomi-bisnis dalam peringkat Carroll (Carroll 2016), mengalami pergeseran peringkat menjadi orientasi pada etis, hukum, ekonomi dan filantropis (Baden 2016). Hal ini menitik beratkan pada dasar filosofis dari CSR pada 'Common-Sense Morality' (Boso, Afrane, and Inkoom 2017).

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR), merujuk pada Arnstein (1969), partisipasi beberapa pemangku-kepentingan (*stakeholders participation*) menjadi penting, yakni pertama, pemerintah. Pemerintah dapat melakukan peran dalam empat ranah: menyediakan data dan informasi; memberikan dukungan infrastruktur publik, melaksanakan sosialisasi program, dan menginisiasi

kebijakan insentif fiskal. Pemangku kepentingan yang kedua adalah sektor privat (perusahaan). Perusahaan perlu memposisikan diri sebagai pihak yang harus merencanakan CSR secara matang, mengeluarkan anggaran untuk investasi sosial, dan membuka ruang sehingga tercipta sinergitas CSR dengan kebijakan pemerintah dan masyarakat. Ketiga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (Soemanto 2007).

Oleh karena itu, dalam konteks perusahaan maka CSR perlu diimplementasi dalam kerangka *good corporate governance system*. Sedangkan dalam konteks sinergitas antar kelembagaan (*institutional sustainability*) (Lélé 1999) dan implementasi program perlu merujuk kepada kerangka *good governance system* (Nasdian 2013). Implementasi program, tentunya memberikan dampak dan kontribusi terhadap warga komunitas desa atau desa binaan. Dampak dan kontribusi yang dimaksud, di satu sisi bisa positif bagi warga komunitas desa dan di sisi lain bisa negatif. Semua ini tergantung dari manajemen pelaksanaan program di lapangan. Apabila intensitas pelibatan (partisipasi) warga komunitas desa dilakukan dengan baik mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi, maka dimungkinkan persepsi dan kepuasan warga komunitas desa menjadi positif, dan sebaliknya apabila intensitas partisipasi warga relatif rendah, maka dimungkinkan persepsi dan kepuasan bersifat negatif bagi komunitas desa. Setiap pemangku kepentingan memiliki tipe dan tingkat partisipasi yang berbeda. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggota dewan keuangan mikro dalam setiap langkah implementasi program, semakin tinggi dampak sosial dan ekonomi yang didapat (Rosyida and Nasdian 2011).

Oleh karenanya, program CSR sebaiknya dirancang secara bersama antara perusahaan, warga, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, CSR selain menjadi kebutuhan untuk mengubah citra dunia usaha yang ramah lingkungan juga kini menjadi kekuatan untuk membangun reputasi perusahaan. Tidak hanya menguasai pasar (pelanggan), tetapi juga membangun relasi dan kerjasama dengan pemangku-kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, dan gerakan keswadayaan. Kedepan diharapkan CSR dapat membantu mengatasi harapan sosial terbaru dalam menghasilkan nilai bersama sebagai tujuan bisnis utama (Latapí Agudelo, Jóhannsdóttir, and Davídsdóttir 2019).

### **Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pelibatan Komunitas**

Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah respon kritis terhadap pola pembangunan yang sentralistik dan seragam di Indonesia. Sebagai sebuah konsep, pemberdayaan masyarakat sebenarnya berakar pada paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*). Berbagai ciri dari pendekatan pembangunan yang bertumpu pada komunitas tersebut diarahkan untuk menciptakan kemandirian dan meningkatkan kemampuan masyarakat yang harapannya mampu mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Di sisi lain, pendekatan pembangunan dengan pola ini juga akan menjamin tumbuhnya *self sustaining capacity* masyarakat menuju *sustainable development*.

Menurut Dunham et al. (1994), pengembangan masyarakat merupakan sebuah proses dimana masyarakat desa bersama-sama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk

memenuhi keinginan mereka. Usaha tersebut dilakukan secara terorganisir guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga sukarela lainnya.

Sejalan dengan itu, pemberdayaan masyarakat, menurut Olson & Brennan (Kenny et al. 2018) menitikberatkan pada “*community engagement to community emergence*”, dimana munculnya komunitas sebagai rangkaian tindakan kolektif individu dalam suatu wilayah yang mencakup aspek sosial yang berbeda untuk menangani masalah-masalah umum, yang berkaitan dengan suatu tempat tertentu (Bridger, Brennan, and Luloff 2011; Kaufman 1959; Wilkinson 1991). Model ini disusun berdasarkan prinsip bahwa interaksi dan keterlibatan di semua tingkatan memfasilitasi pengembangan dan kemunculan masyarakat.

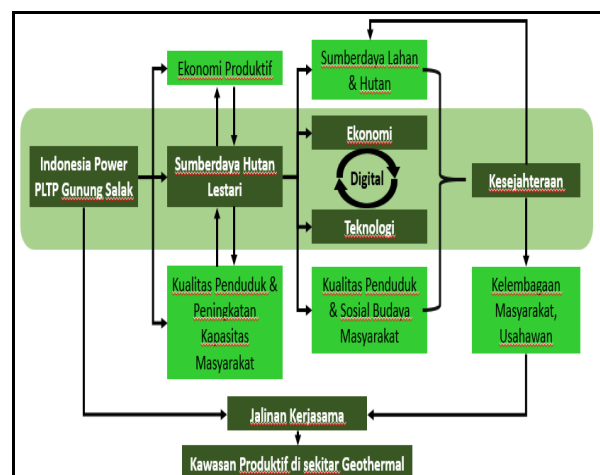
### Kerangka Sistem Pelaksanaan CSR

Program-program dalam Renstra CSR PTIPGS 2018-2022 akan dijalankan dalam suatu kerangka sistem pelaksanaan program. Kerangka sistem ini terdiri atas lima pilar kegiatan CSR, yaitu sumberdaya lahan dan hutan, ekonomi, teknologi digital, dan kualitas penduduk & sosial-budaya masyarakat. Program-program tersebut saling terkait dan dijalankan atas dasar jalinan multi-pihak (*stakeholders*) yang saling memberdayakan. Kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan diharapkan dapat berkelanjutan, sehingga akan terus dilaksanakan walaupun PTIPGS sudah tidak lagi beroperasi. Kegiatan-kegiatan CSR juga diharapkan untuk dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan daerah. Hal ini sebagaimana CSR dengan 'Model Chatterjee,' dalam sudut pandang pembuat kebijakan, bahwa CSR harus berkontribusi pada agenda nasional suatu negara, membantunya untuk mempercepat transisinya dari negara berkembang ke negara maju (Chatterjee and Mitra 2017).

Kegiatan bidang sumberdaya lahan dan hutan akan mendukung kelestarian alam. Selain itu akan menjaga kualitas dan kuantitas air untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat juga untuk operasional PTIPGS. Pengembangan program ekonomi diharapkan akan meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan juga harus mendukung kelestarian lingkungan. Peningkatan pendapatan akan membuat masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, peningkatan pendapatan juga akan berdampak positif terhadap kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan pelestarian budaya. Pengembangan ekonomi masyarakat juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Salah satunya adalah teknologi digital.

Penerapan teknologi digital akan mempercepat pembangunan ekonomi dengan memperluas peluang bisnis dan jaringan yang ada. Pengembangan ekonomi yang berbasis teknologi digital membutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan keberlanjutan sumberdaya alam sebagai input kegiatan ekonomi. PTIPGS dapat membantu menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui kegiatan CSR dibidang kualitas penduduk dan sosial budaya masyarakat. Hubungan antar bidang ini akan berjalan harmonis jika terdapat dukungan infrastruktur yang memadai, serta sumberdaya air,

energi, dan dukungan industri. Keempat bidang yang saling terkait ini membutuhkan jalinan multi-pihak *stakeholders* yang saling memberdayakan. Jika semuanya berjalan baik, maka tujuan untuk ikut berpartisipasi aktif membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, religius, mandiri, mampu keluar dari ketertinggalan, dan berkelanjutan akan terwujud. Adapun pola inisiasi CSR untuk penguatan pengelolaan desa membangun yang dilakukan oleh PTIPGS diilustrasikan melalui Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan kuantitatif, disamping menggunakan data sekunder, juga dilakukan survei dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dan sasaran penelitian pada sejumlah responden, sedangkan pendekatan kualitatif, selain menggunakan studi kasus, sesuai dengan tujuan dan sasaran studi diterapkan pula metode pemetaan sosial (*social mapping*), dimana peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap informan. Adapun dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan validitas data dan reliabilitas instrumen dilakukan triangulasi data dengan beragam sasaran pengamatan, metode dalam pengumpulan dan analisis data.

Desain penelitian ini, menggunakan *a sequential mixed model research* dengan proses analitik dan tampilan metode campuran (Cameron 2009). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah gabungan metode kualitatif dengan kuantitatif mengandalkan instrumen panduan wawancara dan diskusi terfokus, kuesioner terhadap responden yang dipilih secara acak terstratifikasi, serta penggunaan data sekunder.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Keterbukaan Wilayah

Kawasan Gunung Salak sejak dulu dikenal sebagai jalur perlintasan alternatif yang menghubungkan wilayah Kabupaten Bogor bagian barat dan selatan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi. Dapat dikatakan bahwa jalur yang melintasi kawasan ini adalah jalur yang telah lama hidup dan dimanfaatkan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan terbukanya aksesibilitas masyarakat di kawasan Gunung Salak, termasuk desa-desa di sekitar wilayah operasi PTIPGS, baik untuk kepentingan sosial, bisnis, pemerintahan, pendidikan dan lain-lain ke kota-kota/pusat pertumbuhan

yang ada di sekitar seperti Leuwiliang, Jasinga, Kota Bogor, Pelabuhan Ratu, Cianjur bahkan Bandung sebagai ibukota provinsi dan Jakarta sebagai ibukota negara.

Perkembangan kondisi ini erat kaitannya dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan yang melintasi kawasan Gunung Salak dimana semakin lama, kondisi jalan dan jembatan yang ada menjadi semakin baik. Salah satu contoh, di wilayah Kabupaten Bogor tepatnya di kawasan hutan sebelum PTPN VIII Cianten, kondisi jalan pada sekitar Tahun 2005 dan sebelumnya masih sangat jelek dimana jalan belum dilapisi aspal dan masih berupa lapisan batu-batu besar dan kerikil serta tanah padat. Namun saat ini, jalan di kawasan tersebut sudah dilapisi menggunakan beton cor sehingga mudah dilalui masyarakat. Contoh lain adalah jalan di perbatasan wilayah Kabupaten Bogor dengan Sukabumi, tepatnya di batas Desa Purwabakti dengan Desa Cipeuteuy yang kondisinya kurang lebih sama, belum dilapisi aspal dan becek pada saat kondisi hujan. Sebelum Tahun 2010, jalan berupa tanjakan curam tersebut masih sulit dilalui masyarakat khususnya pendatang yang belum mengenal medan jalan karena dibutuhkan kondisi kendaraan khusus (truk atau kendaraan dobel gardan) agar bisa melewati kawasan tersebut. Namun dengan sudah diaspalnya permukaan jalan tersebut, saat ini bahkan tersedia Bus DAMRI yang setiap hari rutin melayani penumpang untuk rute Leuwiliang – Pelabuhan Ratu.

Peningkatan kualitas jalan ini dengan sendirinya membawa banyak perubahan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan Gunung Salak, termasuk desa-desa di sekitar wilayah operasi PTIPGS. Secara kasat mata dapat dilihat bahwa dengan adanya jalan yang baik, maka semakin bermunculan sarana angkutan umum dan kendaraan pribadi yang mempermudah masyarakat mengakses wilayah kota seperti Leuwiliang di sebelah utara dan Kota Sukabumi di sebelah selatan. Peningkatan intensitas interaksi masyarakat dengan dunia luar dalam berbagai kepentingan, baik pemerintahan, pendidikan, bisnis, sosial dan kepentingan lainnya, pada gilirannya juga membawa dampak terhadap perkembangan desa-desa tempat tinggal mereka beserta segala aspek yang ada di dalamnya.

Lebih khusus, perkembangan aksesibilitas yang berasal dari dua sisi, sisi Leuwiliang dari sebelah utara menuju kawasan Gunung Salak dan sisi Parungkuda menuju kawasan Gunung Salak dari sebelah selatan menimbulkan perbedaan dalam kecepatan perkembangan desa-desa yang dilalui oleh jalan tersebut. Dimana desa-desa yang lebih dulu terbuka akan lebih dulu juga berinteraksi dengan dunia luar berikut segala dampaknya, termasuk percepatan pembangunan, masuknya investasi, insentif pasar, yang pada gilirannya menciptakan perubahan sosial pada masyarakat serta perubahan ekologi pada kondisi sumberdaya alam, hutan dan lahan. Dalam hal inilah perbedaan kecepatan perkembangan ini turut menciptakan desa-desa yang memiliki tipologi berbeda. Pemaparan kajian pemetaan sosial ini pada bagian selanjutnya akan membahas perbedaan tipologi yang ada dalam perkembangan desa-desa di sekitar wilayah operasi PTIPGS beserta komunitas di dalamnya pada perspektif perkembangan kawasan yang dipicu oleh pembukaan aksesibilitas

### **Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya 10 Desa Sekitar Wilayah Operasi PTIPGS**

#### *Interaksi Sosial dan Komunikasi*

Berdasar pada hasil survey di 10 desa sekitar wilayah operasi PTIPGS, pola interaksi sosial dan komunikasi masyarakat sudah berjalan sangat terbuka. Masyarakat sudah siap sebagai individu maupun komunitas menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di luar desa untuk bekerjasama menciptakan sesuatu yang produktif bagi dirinya. Hal ini menjadi nilai tambah yang dimiliki oleh masyarakat apabila memulai sebuah kerjasama. Pola interaksi terbuka ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah rencana usaha yang dilaksanakan secara inklusif di desa dan kawasan perdesaan.

#### *Sistem Pelapisan Sosial, Posisi, dan Peranan Sosial*

Masyarakat 10 desa sekitar wilayah operasi PTIPGS cukup religius. Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang cukup tersedia di dalam desa. Selain jumlah, masing-masing sarana peribadatan ini juga memiliki pengajian rutin setiap minggunya. Hal ini menegaskan peran agama, khususnya islam di dalam desa masih sangat kuat berpengaruh. Selain itu, masyarakat juga masih melihat tokoh pemerintahan sebagai seorang sosok yang cukup berpengaruh di dalam desa. Kepala desa pastinya memiliki peranan cukup sentral dimana kapasitas kepala desa haruslah menonjol, dapat dilihat hasil kinerja desa saat ini mayoritas merupakan desa mandiri dan berkembang menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM). Pola pengawasan mulai dari identifikasi isu, perencanaan pembangunan, sampai dengan lobi politik di tingkatan atas pemerintahan juga wajib dimiliki oleh tokoh pemerintahan di dalam desa. Selain itu, terdapat juga pengusaha, petani dan buruh tani sebagai lapisan sosial yang saling melengkapi peran inklusif di dalam desa. Sehingga apabila diurutkan sistem pelapisan yang berlangsung di dalam desa adalah sebagai berikut. Peringkat pertama adalah tokoh agama, kedua adalah tokoh pemerintahan, diikuti masing masing oleh tokoh pengusaha, petani dan buruh tani.

#### *Modal Sosial, Kelembagaan, dan Jejaring Sosial*

Sepuluh desa sekitar wilayah operasi PTIPGS memiliki tipologi sumberdaya alam yang secara umum bertumpu pada pertanian, kehutanan, perkebunan. Perkembangan desa yang cepat seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik, membuat masyarakat khususnya dikalangan muda mulai bergeser dari orientasi pemanfaatan sumberdaya alam menuju sektor jasa dan perdagangan di perkotaan. Lahan-lahan pertanian di desa ini telah banyak mengalami pergeseran menjadi lahan perkebunan skala besar, agribisnis skala menengah milik orang luar dan perumahan. Rata rata kepemilikan lahan penduduk adalah 0,2 Ha/keluarga dan sebagian besar penduduk yang masih menggantungkan pada pertanian hanya sebagai buruh tani. Adanya kesenjangan kepemilikan lahan tersebut memicu munculnya konflik agraria yang terjadi antara perkebunan skala besar dengan buruh tani yang tuna lahan.

#### *Penghidupan (Livelihood)*

Adapun dalam pemanfaatan sumberdaya alam, masyarakat 10 desa sekitar wilayah operasi PTIPGS telah bergeser dari *direct entitlement* dimana masyarakat memproduksi pangan mereka sendiri menuju *trade and exchange entitlement*, yaitu mempertukarkan produk dan jasa mereka untuk mendapatkan keuntungan, yang digunakan untuk membeli pangan. Akibatnya, tekanan populasi dan pasar membuat sebagian masyarakat yang belum terserap di sektor perdagangan dan

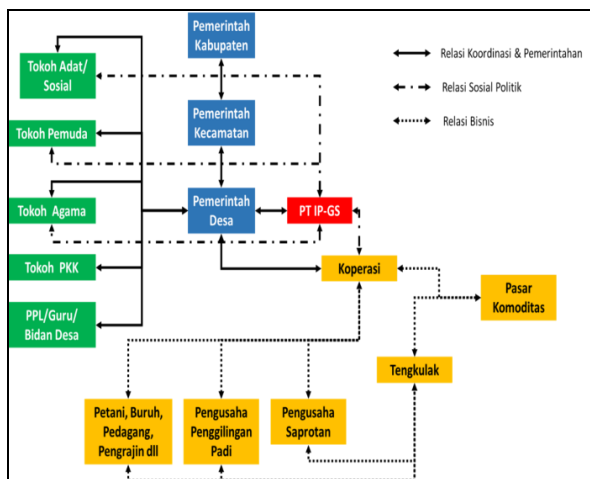
jasa, melakukan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan.

**Kultur Masyarakat**

Kultur masyarakat Sunda sangat terlihat dalam lingkup desa. Hal ini menjadikan masyarakat di 10 desa sekitar wilayah operasi PTIPGS memiliki ciri etnis yang spesifik. Proses sosialisasi cenderung tidak ada hambatan dan dapat berlangsung dengan baik mengingat sebagian besar warga komunitas adalah penduduk asli suku Sunda yang masih memiliki garis kekerabatan, memiliki kesamaan budaya dan telah lama bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain.

**Jaringan Kepentingan dan Kekuatan Antar Aktor**

Interaksi antar anggota dan kelompok masyarakat menghasilkan berbagai bentuk kelembagaan yang berkembang sesuai dengan fungsi dan kepentingan masing-masing kelembagaan. Pola yang muncul di desa-desa sekitar wilayah operasi PTIPGS relatif sama dimana anggota masyarakat pada umumnya berorientasi pada banyak kelembagaan tergantung konteks aktifitas dari kelembagaan tersebut. Misalnya dalam hal kegiatan perekonomian, anggota masyarakat merupakan bagian dari kelembagaan pertanian, sedangkan dalam hal kegiatan kerohanian maka anggota masyarakat merupakan bagian dari kelembagaan pengajian. Pada umumnya, kelembagaan yang berkembang di desa-desa sekitar wilayah operasi PTIPGS terdiri dari kelembagaan pemerintahan desa, kelembagaan ekonomi masyarakat, kelembagaan kerohanian masyarakat, kelompok pemuda dan kelompok wanita. *Stakeholder* sendiri diartikan sebagai orang, kelompok atau lembaga-lembaga yang kemungkinan besar terkena pengaruh atau memberikan pengaruh dari/kepada proses kehidupan bermasyarakat di desa-desa sekitar wilayah PTIPGS. Berikut adalah pemetaan jaringan aktor di wilayah pengembangan PTIPGS (Gambar 2). Aktor-aktor yang berperan dalam pembangunan desa memiliki *power* dan *interest* yang berbeda-beda. Adapun paparan secara singkat mengenai posisi dan perbedaan *power* dan *interest* masing-masing aktor dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 2. Sociogram Jaringan Aktor di 10 Desa Wilayah Pengembangan PTIPGS

**Kebutuhan dan Kerentanan Masyarakat**

Penentuan sumber kerentanan yang dimaksud dalam Kajian Pemetaan Sosial PTIPGS ini dibatasi pada aspek sosial ekonomi dan kebencanaan. Oleh karenanya kelompok rentan

		INTEREST	
		LOW	HIGH
POWER	HIGH	<b>A</b> Institusi: Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kecamatan	<b>B</b> Institusi: Pemerintah Desa Kelompok Pemuda
	LOW	<b>D</b> Individu: Pengusaha Saprotan Tengkulak	<b>C</b> Institusi: Gapoktan Desa PT Star Energy PT IP Gunung Salak Tokoh-tokoh di Desa

Gambar 3. Kuadran *Power* dan *Interest* antar Aktor

yang dimaksud dalam bagian ini adalah kelompok masyarakat yang berpotensi akan menghadapi masalah dalam kehidupan dan penghidupan mereka karena ketidakmampuan mereka dalam merespon perubahan kondisi sosial, ekonomi atau terjadinya sebuah bencana. Perubahan kondisi tersebut misalnya dapat berupa gejolak politik nasional maupun lokal, kerusuhan, konflik horizontal masyarakat (sosial) kemerosotan ekonomi nasional, kondisi gagal panen, turunnya harga komoditas pertanian (ekonomi) atau bencana tanah longsor, banjir bandang dan kebakaran (kebencanaan). Deskripsi Kelompok Rentan di Wilayah Operasi PTIPGS secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi kelompok rentan di wilayah operasi PTIPGS

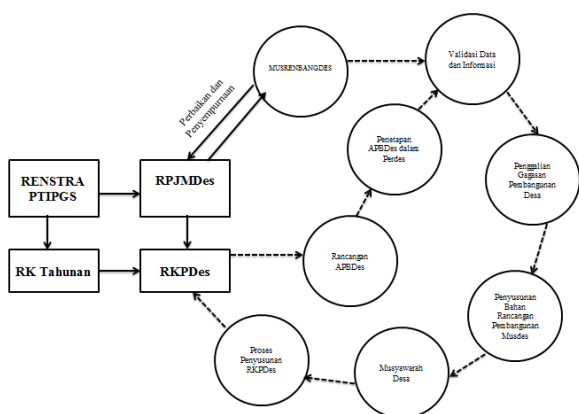
No	Jenis Kerentanan	Deskripsi	Individu/Kelompok	Domisili
1	Aset	Rendahnya kepemilikan aset baik konsumtif maupun produktif	Kelompok masyarakat yang terkategori KK Miskin sesuai data di pemerintah desa	Desa-desa Cibuniam, Ciasmara, Purwabakti, Cipeuteuy, Cihemerang, Kabandungan, Pulosari, Palasari Girang, Kalapanunggal dan Sundawenang
2	Akses	Rendahnya akses terhadap lahan produktif untuk kegiatan pertanian	Kelompok masyarakat yang terkategori buruh tani	Desa-desa Cibuniam, Ciasmara, Purwabakti, Cipeuteuy, Cihemerang, Kabandungan, Pulosari, Palasari Girang, Kalapanunggal dan Sundawenang
3	Akses	Rendahnya akses terhadap peluang berusaha dan bekerja yang dapat memberikan penghasilan yang layak	Kelompok masyarakat usia produktif	Desa-desa Cibuniam, Ciasmara, Purwabakti, Cipeuteuy, Cihemerang, Kabandungan, Pulosari, Palasari Girang, Kalapanunggal dan Sundawenang

**Sinergitas Pengelolaan Desa Membangun dengan *Corporate Social Responsibility* oleh PTIPGS**

Mekanisme *corporate social responsibility* oleh PTIPGS bersinergi dalam pengelolaan desa membangun dari Pemerintah Desa berbasis kerjasama multipihak. Hal ini dilihat dengan adanya upaya penyusunan aspirasi masyarakat sebagai aktor penting di dalam pembangunan desa. Skema sinergi ini tergambar dalam Gambar 4. Rencana Strategis (Renstra) CSR disinergikan dengan Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes). Penyesuaian kegiatan dari rencana tersebut diterjemahkan dalam rencana tahunan

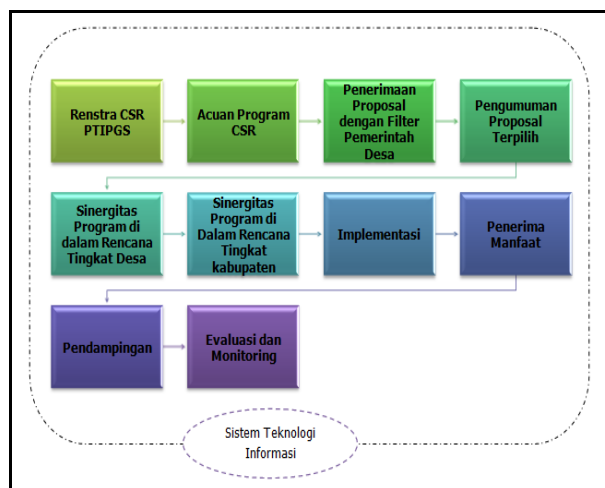
kegiatan CSR dengan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) pada setiap tahun.

Implementasi kegiatan Desa Membangun menggunakan pendanaan sesuai dengan prosedur masing-masing lembaga. Dalam kaitan pemanfaatan dana CSR PTIPGS dapat berupa penyaluran bantuan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat langsung. Mekanisme sebagaimana digambarkan dalam Gambar 5. Dengan demikian, komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan PTIPGS, menjadi pendorong keberhasilan implementasi program pembangunan. Tahapan lain yang perlu diperhatikan adalah penguatan kapasitas komunitas dengan pendampingan yang intensif.



Gambar 4. Sinergi kegiatan CSR dengan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Desa Membangun dari Pemerintah Desa.

Setiap pemberian bantuan bukan menjadi kegiatan *charity*, tetapi perlu dijadikan kegiatan pendampingan usaha dari masyarakat. Kegiatan pendampingan ini perlu dapat diukur dan terekam dengan baik keberhasilannya. Skema perbaikan juga bersifat dinamis, sehingga membuka ruang untuk berbenah, baik dari sisi PTIPGS dan masyarakat selama periode 2018-2022, maupun dari pemerintah desa-desa.



Gambar 5. Skema usulan bantuan penyaluran CSR PTIPGS

Mekanisme sinergi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah desa-desa sekitar tapak proyek PTIPGS perlu disempurnakan. Sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 4 sebelumnya, perbaikan mekanisme perlu difasilitasi oleh PTIPGS mulai dari tingkat dusun hingga desa. Mekanisme ini menjadi ruang juga untuk melibatkan seluruh *stakeholders*. Pada akhirnya, PTIPGS akan berperan sebagai

sebuah *hub* bersama yang dapat menghubungkan segala bentuk kepentingan tersebut. Berdasarkan pada visi misi yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan diyakini pola berbagi peran dapat dengan baik dilakukan. Keterlibatan seluruh pihak disadari menjadi penting untuk dapat saling bahu membahu untuk membangun desa-desa secara inklusif. Adapun pola keterikatan perencanaan dan penganggaran dimulai dari desa yang nantinya akan diselaraskan hingga tingkat daerah (kabupaten dan provinsi) hingga pemerintah pusat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi pengelolaan Desa Membangun dengan kegiatan CSR dari PTIPGS dapat dilakukan melalui perumusan acuan program bersama yang saling isi dan dirumuskan berdasarkan Renstra CSR PTIPGS dengan RPKMDes masing-masing desa. Rumusan acuan tersebut pada akhirnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RK Tahunan) CSR dengan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) pada setiap tahun.

Sinergi kegiatan Desa Membangun menjadi terintegrasi yang mampu membangun visi misi yang sama yaitu menciptakan masyarakat yang menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan diyakini pola berbagi peran dapat dengan baik dilakukan. Prosesnya melibatkan berbagai *stakeholders* yang berbasis pada penguatan kapasitas komunitas. Mekanisme ini menjadi temuan baru yang dapat dijadikan inovasi sosial.

Implikasi kebijakan dari simpulan diatas adalah : Pertama, PTIPGS akan terus memperkuat kelembagaan perencanaan pembangunan desa-desa dalam melakukan fasilitasi kegiatan CSR-nya. Berbagai kegiatan CSR akan menjadi bagian yang tidak terlepas dari rumusan dokumen rencana kerja pemerintah desa tahunan dan mengikuti proses evaluasi pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa setiap tahunnya.

Kedua, PTIPGS bersama *stakeholders* akan ikut menyiapkan rancangan pengembangan wilayah, khususnya dalam memelihara keberlanjutan pembangunan dalam merespon pembukaan isolasi wilayah di kawasan Gunung Salak. Fokus dalam hal ini berkaitan dengan memelihara fungsi kelancaran aksesibilitas wilayah yang belum memiliki infrastruktur jalan yang baik. Hal ini penting diperhatikan karena dengan aksesibilitas yang baik dapat memperlancar berbagai kegiatan pembangunan dari pemerintah desa maupun pihak-pihak lain.

Ketiga, PTIPGS akan terus melakukan pengembangan jejaring kolaborasi berbasis hasil pemetaan *stakeholders* baik dari sisi kepentingan maupun derajat pengaruhnya. Hal ini dilakukan dengan menerapkan strategi komunikasi yang direncanakan dengan baik, agar *stakeholders* yang ada dapat dioptimalkan perannya sebagai mitra strategis PTIPGS dalam aktifitas CSR-nya di masing-masing desa. Prosesnya tentunya dengan tetap mematuhi mekanisme pelaksanaan CSR yang telah ditetapkan. Pengembangan jejaring stakeholder ini penting diletakkan dalam konteks kemitraan antara PTIPGS dengan pemerintah masing-masing desa, agar terbangun implementasi sistem CSR yang konsisten dengan tata kelola yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pemantauannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abukari, Abdul Jelil and Ibn Kailan Abdul-Hamid. 2018.

- “Corporate Social Responsibility Reporting in the Telecommunications Sector in Ghana.” *International Journal of Corporate Social Responsibility* 3(2):1–9.
- Angelia, Dessy and Rosita Suryaningsih. 2015. “The Effect of Environmental Performance And Corporate Social Responsibility Disclosure Towards Financial Performance (Case Study to Manufacture, Infrastructure, And Service Companies That Listed At Indonesia Stock Exchange).” Pp. 348–55 in *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Vol. 211. Bali: Elsevier B.V.
- Arnstein, Sherry Phyllis. 1969. “A Ladder of Citizen Participation.” *Journal of the American Institute of Planners* 35(4):216–24.
- Baden, Denise. 2016. “A Reconstruction of Carroll’s Pyramid of Corporate Social Responsibility for the 21st Century.” *International Journal of Corporate Social Responsibility* 1(8):1–15.
- Del Baldo, Mara. 2018. “Sustainability and CSR Orientation through ‘Edutainment’ in Tourism.” *International Journal of Corporate Social Responsibility* 3(5):1–14.
- Boso, Richard Kwasi, Sam K. Afrane, and Daniel K. B. Inkoom. 2017. “Motivations for Providing CSR-Mediated Initiatives in Mining Communities of Ghana: A Multiple-Case Study.” *International Journal of Corporate Social Responsibility* 2(7):1–15.
- Bridger, J. C., M. A. Brennan, and Luloff. 2011. “The Interactional Approach to Community.” Pp. 85–100 in *Introduction to Community Development: Theory, Practice, and Service-Learning*, edited by J. W. Robinson and G. P. Green. Thousand Oaks: Sage.
- Cameron, Roslyn. 2009. “A Sequential Mixed Model Research Design: Design, Analytical and Display Issues.” *International Journal of Multiple Research Approaches* 3(2):140–52.
- Carroll, Archie B. 2016. “Carroll’s Pyramid of CSR: Taking Another Look.” *International Journal of Corporate Social Responsibility* 1(3):1–8.
- Chatterjee, Bhaskar and Nayan Mitra. 2017. “CSR Should Contribute to the National Agenda in Emerging Economies - the ‘Chatterjee Model.’” *International Journal of Corporate Social Responsibility* 2(1):1–11.
- Dunham, Randall B., Jean A. Grube, and Maria B. Castañeda. 1994. “Organizational Commitment: The Utility of an Integrative Definition.” *Journal of Applied Psychology* 79(3):370–80.
- García-Chiang, Armando. 2018. “Corporate Social Responsibility in the Mexican Oil Industry: Social Impact Assessment as a Tool for Local Development.” *International Journal of Corporate Social Responsibility*.
- Kaufman, H. F. 1959. “Toward an Interactional Conception of Community.” *Social Forces*.
- Kenny, Sue, Brian McGrath, and Rhonda Phillips. 2018. *The Routledge Handbook of Community Development*. New York: Routledge.
- Khan, Majid, James C. Lockhart, and Ralph J. Bathurst. 2018. “Institutional Impacts on Corporate Social Responsibility: A Comparative Analysis of New Zealand and Pakistan.” *International Journal of Corporate Social Responsibility*.
- Kolk, Ans. 2016. “The Social Responsibility of International Business: From Ethics and the Environment to CSR and Sustainable Development.” *Journal of World Business* 51(1):23–34.
- Latapí Agudelo, Mauricio Andrés, Lára Jóhannsdóttir, and Brynhildur Davídsdóttir. 2019. “A Literature Review of the History and Evolution of Corporate Social Responsibility.” *International Journal of Corporate Social Responsibility*.
- Lélé, Sharachandra M. 1999. “Sustainable Development: A Critical Review.” *World Development* 19(6):607–21.
- Moratis, Lars and Max van Egmond. 2018. “Concealing Social Responsibility? Investigating the Relationship between CSR, Earnings Management and the Effect of Industry through Quantitative Analysis.” *International Journal of Corporate Social Responsibility*.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2013. *Pengembangan Masyarakat*. IPB Press.
- Nguyen, Minh, Jo Bensemann, and Stephen Kelly. 2018. “Corporate Social Responsibility (CSR) in Vietnam: A Conceptual Framework.” *International Journal of Corporate Social Responsibility* 3(1).
- Nirmaya, Gilar Cahya, Istiqlaliyah Muflikhati, and Megawati Simanjuntak. 2014. “Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Sekitar Tambang.” *Jur. Ilm. Kel. & Kons* 7(1):19–29.
- Pisani, Niccolò, Arno Kourula, Ans Kolk, and Renske Meijer. 2017. “How Global Is International CSR Research? Insights and Recommendations from a Systematic Review.” *Journal of World Business*.
- Rabin Ibnu Zainal. 2006. *Best Practices: Corporate Social Responsibility (CSR) Sebuah Pengalaman Membangun Multistakeholder Engagement Bagi Penerapan CSR Di Kabupaten Muba Sumatera Selatan*. Palembang: Usaha Musi.
- Rahmaningsih, Faridha. 2013. “Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Media Sosial Studi Kasus Program Corporate Social Responsibility ‘Klik Hati’ PT Merck Indonesia.” *JSP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)* 17(2):116–29.
- Rosyida, Isma and Fredian Tonny Nasdian. 2011. “Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5(1):51–70.
- Simpson, Samuel Nana Yaw and Eunice Kafui Aprim. 2018. “Do Corporate Social Responsibility Practices of Firms Attract Prospective Employees? Perception of University Students from a Developing Country.” *International Journal of Corporate Social Responsibility*.
- Soemanto, Bakdi. 2007. *Sustainable Corporation: Implikasi Hubungan Harmonis Perusahaan Dan Masyarakat*. Semen Gresik.
- Šontaitė-Petkevičienė, Miglė. 2015. “CSR Reasons, Practices and Impact to Corporate Reputation.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences*.
- Torrico, Boris Herbas, Björn Frank, and Carlos Arandia Tavera. 2018. “Corporate Social Responsibility in Bolivia: Meanings and Consequences.” *International Journal of Corporate Social Responsibility* 3(1).
- Wilkinson. 1991. *The Community in Rural America*. New York: Greenwood.



